BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Deskripsi Konseptual

2.1.1. *Technology Acceptance Model* (TAM)

Teknologi Penerimaan Model adalah teori sistem informasi yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengguna memahami dan menggunakan informasi teknologi. Model Penerimaan Teknologi berasal dari *Theory of Reasonable Action* (TRA), yang memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua faktor: persepsi kegunaan teknologi dan persepsi manfaatnya (E. N. Sari & Hermanto, 2016).

Model Penerimaan Teknologi (TAM), yang dikembangkan dari Theory of Reasoned Action (TRA), dianggap dapat memprediksi penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi: (1) Persepsi Kegunaan Penggunaan, yang merupakan keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja kerja mereka; (2) Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use), yang merupakan keyakinan seseorang bahwa menggunakan teknologi dapat meningkatkan kinerja kerja mereka; dan (3) Pandangan Mengenai Penggunaan, sikap pro atau kontra terhadap sesuatu ataupun niat seseorang untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. (4) Keinginan untuk menggunakan teknologi disebut perilaku keinginan untuk menggunakan. (5) Pemakaian nyata, atau penggunaan nyata, adalah kesenangan seseorang untuk menggunakan sistem yang mudah digunakan dan dapat meningkatkan produktivitas (Fadilah & Sapari, 2020).

2.1.2. Theory of Planned Behavior (TPB)

perilaku Teori terencana (Theory of Planned *Behavior*) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) merupakan teori psikologis mendasarkan premisnya pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk logis dan menggunakan informasi secara metodis untuk menguntungkan diri sendiri. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu : (1). Norma subjektif (Subjective Norm) adalah opini orang dekat penting yang mempengaruhi keputusan dalam berperilaku memotivasi individu dalam harapan orang lain, (2). Sikap (Attitude) adalah kepercayaan terhadap perilaku yang telah dievaluasi secara rasional terhadap perilaku tersebut, (3). Persepsi kontrol dalam berperilaku (Perceived Behavior Control) adalah perasaan individu tentang kemudahan atau kesulitan yang dialaminya dalam melaksanakan perilaku. Teori ini menekankan pentingnya individu untuk mempertimbangkan konsekuensi atau tujuan dari tindakan mereka serta apakah perilaku yag akan dilakukan dianggap normal atau tidak (Shabrina et al., 2024).

Hubungan theory of planned behavior dengan penelitian ini yaitu wajib pajak diharuskan memiliki niat dan sikap percaya pada kepatuhan wajib pajak yang tercipta dari keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan mencakup semua aspek yang relevan dan diketahui, diyakini, serta pengalaman wajib pajak dengan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Persepsi wajib pajak mengenai perilaku patuh pada pajak dapat berubah. Sikap terhadap kepatuhan pajak mungkin menguntungkan atau bisa juga bersifat

negatif. Selanjutnya terungkap niat wajib pajak untuk mentaati atau tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.3. Tax Compliance Model

Tax Compliance Model yang dikembangkan oleh Allingham & Sandmo (1972) adalah model ekonomi yang menjelaskan perilaku kepatuhan pajak individu. Model ini berfokus pada analisis biaya-manfaat dari kepatuhan pajak dan bagaimana individu membuat keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan pajak. Dalam model ini, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu biaya kepatuhan, sanksi pajak, dan probabilitas deteksi. Biaya kepatuhan mencakup biaya waktu dan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh individu untuk mematuhi peraturan pajak. Sanksi pajak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh individu jika mereka tidak mematuhi peraturan pajak, seperti denda dan penalti. Probabilitas deteksi mencakup kemungkinan individu yang tidak mematuhi peraturan pajak akan terdeteksi oleh otoritas pajak. Dengan demikian, model ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan pajak berdasarkan pada analisis biaya manfaat (G.allingham, 2018).

2.1.4. Fiscal Psychology Theory

Fiscal Psychology Theory yang dikembangkan oleh Kirchler, (2007) adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mempersepsikan pajak dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi keputusan mereka untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan pajak. Dalam teori ini,

Kirchler menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah, keadilan pajak, dan norma sosial. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan pajak berdasarkan pada faktor-faktor psikologis.

2.1.5. Institutional Theory

Institutional Theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana organisasi dan individu dipengaruhi oleh norma, nilai, dan aturan yang ada dalam lingkungan institusional mereka. Dalam konteks kepatuhan pajak, Institutional Theory dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor institusional seperti kepercayaan terhadap pemerintah, keadilan pajak, dan norma sosial mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu dan organisasi. Teori ini berfokus pada bagaimana institusi membentuk perilaku dan keputusan individu dan organisasi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kepatuhan pajak (Amenta & Ramsey, 2005).

2.1.6. Deterrence Theory

Deterrence Theory yang dikembangkan oleh Becker (1968) adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan ilegal berdasarkan pada perhitungan biaya dan manfaat. Dalam konteks kepatuhan pajak, Deterrence Theory dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sanksi pajak dan probabilitas deteksi mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu. Teori ini berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan pajak

berdasarkan pada perhitungan biaya dan manfaat, dan bagaimana sanksi pajak yang efektif dapat mencegah individu melakukan tindakan ilegal (Mendes, 2004).

2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya dalam membayar pajak (Daeng & Mahmudi, 2022).

Dalam situasi di mana Wajib Pajak melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya, disebut kepatuhan wajib pajak. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seleuruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan et al., 2019).

2.1.8. Penerapan Sistem *E-filing*

Menurut Haryaningsih & Juniwati, (2021) *E-Filing* merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbasis elektronik kepada Wajib Pajak yang disampaikan dengan cara mengakses secara online dan realtime pada website Direktorat Jendal Pajak (https://www.pajak.go.id/).

Sistem *e-Filing* merupakan sistem yang membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya secara real time. Wajib pajak merasa dengan adanya sistem ini dapat mempermudah mereka dalam menyampaikkan SPT karena dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke KPP atau Kp2kp dan mengantri, yang mana akan menghabiskan waktu wajib Pajak. Sehingga mampu mendorong

wajib pajak untuk cenderung patuh dalam hal memenuh kewajiban perpajakannya (Wulandari, 2019).

E-filing sebagai salah satu program modernisasi perpajakan, merupakan wujud egovernment yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi e-filing ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan komputerisasi. Penggunaan e-filing dilakukan bertujuan agar wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam melaporkan SPTnya dan terciptanya administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan (Maulana & Marismiati, 2021).

2.1.9. Penerapan Sistem *E-billing*

Pembayaran pajak ini dapat dilakukan melalui sistem perpajakan berupa aplikasi ebilling yang dapat diakses oleh wajib pajak. *Billing System* ialah metode membayar melalui elektronik mempergunakan Kode Billing. *E-billing* merupakan surat setor elektronik yang merupakan bentuk digital atau sebagai pengganti dari pengisian surat setor pajak (SSP) secara manual. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektonik. Dengan demikian, para wajib pajak yang akan melakukan proses dalam membayarkan pajaknya dapat menggunakan sistem online melalui *e-billing* ini, sebagai aplikasi untuk memperoleh kode billing yang digunakan untuk membayar pajak kepada DJP setempat (Riyani & Yanto, 2023).

Adanya sistem *e-billing* membuat muncul rasa kemudahan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna sistem tersebut. Tujuan dari adanya rasa kemudahan dan kepuasan dalam penggunaan sistem *e-billing* diharapkan mampu untuk membuat subjek Wajib Pajak Badan yang belum memakai sistem *e-billing* dapat menggunakannya, dan dalam penggunaan sistem diharapkan mampu untuk membuat subjek Wajib Pajak Badan merasakan pembayaran yang lebih berkualitas (Yusdita, 2017).

2.1.10. Penerapan Sistem *E-SPT*

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat (11), surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan-undangan pajak. Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014, yang mengatur cara mengirimkan surat pemberitahuan tahunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, pengisian elektronik adalah aplikasi web yang digunakan untuk melakukan SPT Tahunan secara instan melalui internet (Nurbaiti *et al.*, 2016).

Penyampaian SPT secara elektonik ini adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat wajib pajak lebih mudah melaporkan jumlah pajak yang harus dikomunikasikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Masyarakat sekarang dapat membayar pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung jumlah pajak yang terhutangnya. Karena semua dokumen wajib pajak

disimpan secara digital, teknologi *e-SPT* memudahkan pegawai pajak dalam mengelola data base (*N. P. Sari et al.*, 2015).

2.1.11. Penerapan sanksi Pajak

Sanksi perpajakan diatur dalam undang-undang perpajakan sebagai jaminan. Sanksi pajak dirancang untuk membantu wajib pajak mematuhi peraturan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada dua jenis sanksi: administrasi dan pidana (Clarina Freshya Waruwu & Lorina Siregar Sudjiman, 2022).

Pemenuhan pajak wajib dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, seperti pendapat mereka tentang sanksi dan tingkat kesadaran mereka, Jika seseorang tidak mematuhi peraturan pajak, mereka harus dikenakan sanksi pajak. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, denda, atau pidana. Pada hakikatnya, sanksi perpajakan digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, memahami sanksi perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak agar mereka dapat memahami konsekuensi hukum dari apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan (Nurasana Nurasana & Muhammad Rivandi, 2023).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 1Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	
	Penerbit			
1	(Harlim,	Pengaruh penerapan	Hasil penelitian ini	
	2019)	e-spt, e-filling dan e-	menunjukkan bahwa (1)	
		billing terhadap	Penerapan Sistem E-	
		tingkat kepuasan dan	Filling berpengaruh	
		dampak nya pada	signifikan terhadap	
		kepatuhan wajib pajak	kepuasan kualitas	

No	Nama Penerbit	Judul	Hasil Penelitian
			pelayanan. (2) kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan melalui regresi linier sederhana. (3) penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (4) Program <i>e-filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kualitas layanan.
2	(Putri & Junaidi, 2023)	Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	•
3	(Fadilah & Sapari, 2020)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-billing</i> , <i>e-</i> <i>filing</i> dan sanksi perpajakan terhadap	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-billing</i> tidak

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
	Penerbit	Izanatuhan wajih najalz	harnangaruh tarhadan
		kepatuhan wajib pajak	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	(Rizky Pebrina & Amir, 2020)	Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Namun penerapan <i>e-spt</i> dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Sulistyori ni et al., 2017)	Pengaruh penggunaan sistem administrasI <i>e-registration, e- billing, e-spt,</i> dan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan sistem administrasi e-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Penggunaan sistem administrasi e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Penggunaan sistem administrasi e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. kepatuhan perpajakan, 4) penggunaan sistem e-administrasi Pengisian berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
6	(Taslim <i>et al.</i> , 2023)	Pengaruh Penerapan <i>E-billing</i> , Pemahaman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

No	Nama Penerbit	Judul	Hasil Penelitian
	reneron	Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	secara parsial, penerapan <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama
7	(Pradnyan a & Prena, 2019)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama denpasar timur	Majene. Selain Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) e-filing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) e-billing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penggunaan wajib pajak, 3) pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan kepatuhan wajib pajak, 4) e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Novimilld winingrum & Hidajat, 2022)	Pengaruh penerapan e-filing dan e-billing Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-Billing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Dan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
	Penerbit		
		preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating (studi kasus pada kpp pratama surabaya sawahan)	Pemahaman Perpajakan sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan Penerapan E-filing Dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan arah koefisien negatif. Serta Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan Penerapan E-filing Dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan arah koefisien positif.
9	(Nasrun & Adil, 2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penggunaan E-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penggunaan e-filing maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.
10	(Arifin & Syafii, 2019)	Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak siginifikan dari varibael bebas berupa
		pribadi di kpp pratama	

No	Nama Penerbit	Judul	Hasil Penelitian
11	(Kirana,	medan poloni Pengaruh penerapan	penerapan <i>e-billing</i> dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian
	2017)	e-spt, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan spt (di kpp pratama wates)	menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap korporasi Ketaatan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,020, maka tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,039, maka Kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. KPP Pratama Wates, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000.

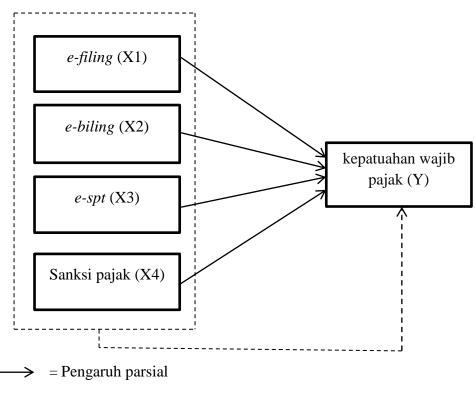
2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, Variabel Dependen yang dianalisis adalah kepatuahan wajib pajak (Y), sedangkan Variabel Independen terdiri dari penerapan sistem *e-filing* (X1), penerapan sistem *e-spt* (X3), dan

Sanksi pajak (X4). Kerangka Konseptual berfungsi sebagai panduan berpikir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



---> = Pengaruh simultan

2.4 Definisi oprasional

Tabel 2.2 Definisi Oprasiaonal

Dermisi Oprasiaonai				
Variabel	Definisi	Indikator	Skala	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu yang penting karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assassement system	diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP	Linkert	

Variabel	Definisi		Indikator	Skala
, aracer	dimana proses pelaporan	2		Bruru
	dan pembayaran pajak		diri sebagai Wajib	
	terutangnya dilakukan		Pajak untuk	
			memiliki NPWP	
	sendiri dengan kesadaran			
	wajib pajak. Maka dari		(Nomor Pokok	
	itu kepatuhan wajib		Wajib Pajak)	
	1 3		Saya selalu tepat	
	disosialisasikan ke pada		waktu dalam	
	masyarakat dengan terus		membayar pajak	
	menerus untuk		terutang	
	memenuhi kebutuhan	4.	Saya selalu	
	kewajiban perpajakan		melaporkan SPT	
	sesuai dengan peraturan		(Surat	
	yang berlaku, karena		Pemberitahuan)	
	perpajakan merupakan		yang telah diisi	
	sumber utama		dengan tepat waktu	
			Saya bersedia	
	(Muhammad &	٦.	memenuhi	
	Mildawati, 2020).		kewajiban atas	
	Williawati, 2020).		tunggakan dan	
			kekurangan pajak	
			yang ada sebelum	
			dilakukan	
		_	pemeriksaan	
		6.	Saya tidak	
			mempunyai	
			tunggakan pajak	
			agar mudah dalam	
			mengurus	
			administrasi	
Penerapan	Anggareny, (2019) e-	1.	Sistem <i>e-Filling</i>	Linkert
E-filing	filing adalah suatu cara		mudah untuk	
(X1)	penyampaian Surat		dipelajari bagi	
,	Pemberitahuan (SPT)		pemula	
	dan penyampaian Surat	2.	1	
	Pemberitahuan	Γ	merupakan fasilitas	
	Perpanjangan (SPT)		pelayanan	
	Tahunan secara		perpajakan yang	
	elektronik untuk wajib		memberikan	
			kemudahan bagi	
	pajak orang pribadi		•	
	dengan memanfaatkan		Wajib Pajak dalam	
	jalur komunikasi internet		pengisian SPT	
	secara online dan		Tahunan.	
	realtime melalui website	3.	0	
	Direktorat Jenderal Pajak		dapat membantu	

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
, 4114001	(http://www.pajak.go.id).	Wajib Pajak dalam	Situitu
	(<u>intp://www.pajanigona</u>).	melaporkan SPT	
		secara cepat.	
		4. Dengan	
		menggunakan	
		fasilitas <i>e-Filling</i>	
		Wajib Pajak tidak	
		perlu lagi datang	
		ke KPP karena	
		pelaporan data	
		SPT dapat	
		dilakukan dimana	
		saja dan kapan	
		saja.	
		5. Dengan	
		diterapkannya	
		sistem <i>e-filling</i> ,	
		saya dapat	
		menghemat biaya	
		untuk melaporkan	
		pajak saya.	
		6. Sistem <i>e-filling</i>	
		lebih ramah	
		lingkungan karena	
		meminimalisir	
		penggunaan kertas.	
penerapan	E-billing adalah metode	Penerapan sistem	Linkert
E-billing	pembayaran pajak secara	e-Billing dapat	
(X2)	elektronik yang	memudahkan dan	
	menggunakan kode	menyederhanakan	
	billing (Primastuti	Wajib Pajak dalam	
	Handayani & Napisah,	proses pembayaran	
	2024).	pajak	
		2. Dengan	
		Menggunakan	
		Sistem <i>e-Billing</i>	
		dapat	
		mempermudah	
		proses pembayaran	
		pajak untuk pajak	
		terutang secara	
		lebih jelas dan	
		terperinci.	
		3. Keakuratan dalam	
		perhitungan dan	

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		pengisian surat	
		setoran pajak <i>e-</i>	
		Billing	
		4. Dengan	
		penggunaan e-	
		Billing	
		meminimalisir	
		kesalahan dalam	
		perhitungan	
		pembayaran pajak	
		5. Dengan adanya <i>e</i> -	
		Billing maka wajib	
		pajak dapat	
		menghemat waktu	
		dalam melakukan	
		proses pembayaran	
		pajak	
		6. Dengan	
		menggunakan	
		fasilitas <i>e-Billing</i>	
		Wajib Pajak dapat	
		melakukan	
		pembayaran pajak	
		dimana saja dan	
		kapan saja karena	
		sifatnya yang fleksibel	
Penerapan	<i>e-SPT</i> merupakan sebuah		Linkert
E-SPT	sistem yang berfungsi	e-SPT dapat	Zimer
(X3)	untuk melaporkan dan	memudahkan	
	menyampaikan Surat	Wajib Pajak dalam	
	Pemberitahuan (SPT).	proses pengisian	
	Penggunaan Sistem e-	datadata	
	SPT berbasis online	perpajakan.	
	dinilai lebih praktis	Penerapan sistem	
	dibandingkan dengan	1	
	menggunakan SPT	J	
	manual yang masih	J 1	
	mempergunakan kertas,	pelaporan SPT	
	sehingga dengan		
	menggunakan <i>e-SPT</i>		
	wajib pajak dapat dengan		
	mudah untuk melakukan	dapat membantu	
	kewajiban perpajakan (Shafira, 2021).	perhitungan Wajib Pajak menjadi	
	(Shaina, 2021).	r ajak iliciljaul	

Variabel	Definisi		Indikator	Skala
			lebih akurat.	
		4.	Sistem <i>e-SPT</i>	
			dapat mempercepat	
			Wajib Pajak dalam	
			proses perhitungan	
			SPT Tahunan	
		5	Penerapan sistem	
		٥.	e-SPT dapat	
			menghemat waktu	
			Wajib Pajak dalam	
			membayar dan	
			•	
			melaporkan SPT Tahunan.	
		_		
		0.	Dengan	
			menggunakan	
			sistem <i>e-SPT</i>	
			Wajib Pajak tidak	
			membutuhkan	
			tenaga ekstra	
			karena dapat	
			dilakukan secara	
			online.	
Penerapan	Penerapan sanksi pajak			Linkert
Sanksi	adalah tindakan yang		sangat dibutuhkan	
Pajak (X4)	dilakukan oleh otoritas		agar terciptanya	
	perpajakan untuk		kedisiplinan wajib	
	memberikan konsekuensi		pajak dalam	
	kepada wajib pajak yang		memenuhi	
	tidak mematuhi		kewajiban	
	ketentuan perpajakan.		perpajakan.	
		2.	Penerapan sanksi	
			perpajakan	
			diperlukan guna	
			terciptanya	
			kepatuhan wajib	
			pajak.	
		3.	Pengenaan besar	
			kecilnya sanksi	
			tergantung	
			pelanggaran	
			tergantung yang	
			dilakukan oleh	
			wajib pajak.	
		4.	Wajib pajak yang	
			tidak patuh akan	

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		dikenai sanksi	
		pajak yang telah	
		ditetapkan.	
		Penerapan sanksi	
		pajak diberikan	
		sesuai dengan	
		ketentuan dan	
		perundang-	
		undangan yang	
		berlaku dan tidak	
		dapat ditoleransi.	
		6. Penerapan sanksi	
		pajak diberikan	
		sebagai efek jera	
		agar wajib pajak	
		tidak mengulang	
		kembali	
		kesalahannya.	

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.5.1 Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem e-filing memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online dan real-time, sehingga mengurangi kesalahan pelaporan dan mempercepat proses pengolahan data. Dengan demikian, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan akurat.

Information Technology Theory menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi seperti *e-filing* dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan waktu pelaporan pajak. Adapun manfaat yang diberikan seperti (1) Kemudahan

pelaporan pajak (2) Penghematan waktu dan biaya (3) Peningkatan kepatuhan wajib pajak (4) Pengurangan kesalahan pelaporan (5) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Sistem *e-Filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik Pada penelitian yang dilakukan oleh Nasrun & Adil, (2022), H.Novimilldwiningrum, (2022), (Putri & Junaidi, 2023) yang menyatakan bahwa Penggunaan *E-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Semakin baik penggunaan *e-filing* maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii, (2019) yang menunjukan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.2 Pengaruh Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem *e-billing* berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menerima tagihan pajak secara elektronik, memudahkan pembayaran, dan mengurangi risiko kesalahan pelaporan. *E-billing* juga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, karena wajib pajak tidak perlu mengunjungi kantor pajak untuk membayar pajak. Selain itu, sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui rekaman digital yang akurat dan aman.

Information Technology Theory Menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi seperti *e-billing* dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi.

Adapun manfaat yang diberikan seperti (1) Kemudahan pembayaran pajak (2) Penghematan waktu dan biaya (3) Peningkatan kepatuhan wajib pajak (4) Pengurangan kesalahan pembayaran (5) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019, sistem pembayaran elektronik menggunakan kode billing didefinisikan sebagai metode pembayaran pajak yang menggunakan kode billing setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik. Kode ini akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller bank, kantor pos, ATM, atau sistem pembayaran online Fadilah & Sapari, (2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019), H.Novimilldwiningrum, (2022) menyatakan bahwa Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, (2021) menyatakan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.3 Pengaruh Sistem *E-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem *e-SPT* (Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik) secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak melaporkan pajak secara online dan real-time, mengurangi kesalahan pelaporan, dan mempercepat proses pengolahan data. *E-SPT* juga menawarkan kemudahan seperti pengisian formulir otomatis, penghitungan pajak akurat, dan

penyimpanan data aman. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mengurangi risiko keterlambatan pelaporan.

Information Technology Theory menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi seperti e-SPT dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan waktu pelaporan pajak. Adapun manfaat yang diberikan seperti (1) Kemudahan pelaporan pajak (2) Penghematan waktu dan biaya (3) Peningkatan kepatuhan wajib pajak (4) Pengurangan kesalahan pelaporan (5) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01, 2016), tujuan pemerintah mengembangkan *e- SPT* adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sehingga, dengan adanya kemudahaan yang diberikan wajib pajak lebih semakin termotivasi untuk membayar pajak Rizky Pebrina & Amir, (2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Harlim, (2019) dan Subkhi Mahmasani, (2020) mengatakan *e-SPT* berpengaruh fositif terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pebrina & Amir, (2020) dan Mahpudin & Ikhsan, (2022) yang menyatakan bahwa penerapan *e-SPT* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Penerapan sistem *e-spt* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi tersebut, seperti denda, bunga, dan pidana penjara, berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) untuk menghindari kesalahan pelaporan dan keterlambatan

pembayaran pajak. Dengan adanya sanksi, wajib pajak merasa tertekan untuk mematuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan akurat.

Legal Theory menjelaskan bahwa sanksi pajak harus sesuai dengan prinsipprinsip hukum dan keadilan. Untuk mendorong hadirnya pajak, sanksi yang
memberatkan wajib pajak diberikan. Namun, jika wajib pajak tidak mengetahui
banyak tentang sanksi perpajakan, mereka dapat berpikir bahwa sanksi bukan hal
yang menakutkan atau memberatkan, yang dapat mencegah ketidakpatuhan
Andiani & Hidayat Mochtar, (2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Nasrun & Adil, (2022) dan Putri & Junaidi, (2023) menyatakan bahwa penerapan
Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, Semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin
tinggi. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Sapari, (2020)
menyatakan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah
sebagai berikut:

H4: Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.